BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hubungan Internasional bukan hanya mencakup berbagai hubungan antar negara atau antar pemerintah secara langsung. Namun juga meliputi berbagai transaksi ekonomi dan perdagangan, strategi dan penggunaan kekuatan militer serta langkah diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah maupun non pemerintah. Hubungan antar negara juga sering didasari oleh adanya persamaan di antara negara - negara tersebut. Mulai dari persamaan bahasa, geografi, ideologi, sampai persamaan kepentingan politik dan ekonomi (Rudy, 2002: 5).

Salah satu bentuk interaksi dalam dunia internasional yaitu pemberian bantuan dari negara maju kepada negara berkembang. Pemberian bantuan asing merupakan instrumen kebijakan luar negeri. Contoh bentuk kerjasama internasional tersebut adalah pemberian bantuan Jepang melalui JICA *(Japan International Cooperation Agency)* kepada beberapa negara berkembang, salah satunya adalah India.

Bantuan luar negeri pemerintah Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* (JICA) merupakan salah satu upaya yang dilakukan untuk pengadaan hubungan bilateral dan multilateral dengan negara lain khususnya dalam membantu terkait pembangunan negara - negara berkembang. Dalam hal ini, JICA kemudian bertanggungjawab atas bantuan yang diberikan pemerintah Jepang untuk mengatasi masalah-masalah pembangunan yang ada di India, salah satunya terkait mengenai proteksi lingkungan yang sesuai dengan indikator

pembangunan jangka panjang lingkungan. Pola - pola hubungan antar negara yang bersifat fundamental telah mengalami perubahan. Perubahan - perubahan yang dimaksud adalah bahwa fenomena - fenomena yang ada di dunia internasional saat ini tidak lagi berfokus pada kajian keamanan saja. Keamanan manusia yang semakin mendapat perhatian dalam studi HI mencakup bidang yang lebih luas, salah satu isu yang menjadi fokus aktor-aktor internasional dewasa ini adalah isu lingkungan.

Dalam hal ini, bantuan yang diberikan berupa bentuk teknis dan pinjaman atau hibah (JICA, 2012: 5). Sebagai salah satu negara maju di dunia, Jepang telah secara aktif memberikan bantuannya melalui berbagai macam bentuk. *Japan International Cooperation Agency* adalah salah satu bagian dari upaya bantuan dalam bidang pembangunan yang dinaungi oleh pemerintah resmi Jepang. Bantuan - bantuan yang diberikan kepada India berupa pemberian kerjasama teknis, peminjaman modal, dan peminjaman dalam mata uang yen. Kerjasama yang dilaksanakan oleh Jepang memanfaatkan dana dan teknologi yang dimiliki melalui kerangka bantuan pembangunan resmi.

Jepang mulai mencanangkan program bantuan di bidang lingkungan hidup semenjak mengikuti konferensi G7 di Bonn, Jerman pada tahun 1985. Ketika isu lingkungan global muncul sebagai area fokus baru dunia, Jepang merupakan donor ODA terbesar di dunia (itu peringkat pertama dari tahun 1990 - 2000). (http://www.mofa.go.jp/policy/oda/cooperation/anniv50/pamphlet/, diakses 18 Mei 2018). Salah satu cara utama Jepang memilih untuk menyajikan kepemimpinan mereka pada masalah ini karena itu menjaminkan sejumlah catatan

untuk mendukung berkelanjutan pembangunan negara - negara berkembang. keberhasilan Jepang dalam mengatasi masalah pencemaran domestik serta kemakmuran ekonomi menempatkan Jepang dalam posisi untuk memainkan peran utama dalam kerjasama lingkungan internasional. (https://www.mofa.go.jp/policy/un/pamph2000_archive/global.html, diakses 6 Mei 2018)

Pemerintah Jepang mendirikan *Japan International Cooperation Agency* (JICA) pada 1 Agustus 1974 dan merupakan institusi resmi Jepang yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kerjasama teknis dengan negara - negara berkembang berdasarkan atas kesepakatan bilateral antar pemerintah secara resmi. JICA dengan format yang baru bertanggungjawab dalam menyalurkan bantuan hibah, kerjasama teknik, serta pinjaman bantuan pembangunan resmi. Meskipun dapat digambarkan bahwa bantuan hibah disalurkan melalui JICA, akan tetapi beberapa jenis bantuan hibah akan tetap diberikan langsung oleh Departemen Luar Negeri Jepang (melalui kantor Kedutaan Besar) dalam rangka kebijakan diplomatik. JICA telah melakukan kerjasama bilateral dengan 150 negara hal tersebut menjadikan JICA sebagai salah satu lembaga pemberi bantuan bilateral terbesar di dunia (JICA, 2012: 4).

Dalam merealisasikan bantuannya untuk India, JICA merumuskan program bantuan yang kemudian disebut *Country Assistance Strategy* atau Strategi Bantuan Pemerintah Jepang. *Country Assistance Strategy* yang dibuat dititik beratkan pada empat bidang prioritas kerjasama. (JICA, 2012: 11)

1. Kesinambungan pertumbuhan ekonomi yang digerakkan oleh sektor swasta
2. Menciptakan masyarakat yang demokratis dan berkeadilan
3. Perdamaian dan stabilitas
4. Lingkungan

Country Assistance Strategy yang dibuat mengacu kepada Rencana Pembangunan Lima Tahun *(Five Year Plan)* India. Hal tersebut dilakukan agar strategi bantuan yang dibuat dapat mendukung pembangunan India sesuai dengan fungsinya bahwa JICA memberikan bantuan bagi pembangunan Negara berkembang.

Kebijakan bantuan luar negeri Jepang mengakui pentingnya signifikansi ekonomi India bagi politik Jepang. Terutama dalam bidang industrialisasi, posisi India di Asia, stabilitas ekonomi, dan masalah yang disebabkan oleh krisis keuangan Asia. Wilayah Asia Selatan memiliki potensi ekonomi yang sangat besar, khususnya di India, negara dengan tingkat demokrasi yang cukup tinggi yang telah meningkatkan kehadirannya di Komunitas Internasional.

India secara strategis penting bagi Jepang karena lokasinya di jalur darat dan jalur laut yang berada diantara Asia Timur dengan Tengah Timur, dan juga sangat penting dalam hal menangani global isu yang berkaitan dengan lingkungan. Namun, pada saat yang sama, kawasan Asia Selatan terutama India masih menghadapi banyak masalah yang harus diatasi. Masalah - masalah ini termasuk kurangnya infrastruktur yang memadai seiring jumlah pertumbuhan

populasi, serta masih kurangnya kesadaran negara berkembang ini dalam hal proteksi lingkungan.

Isu lingkungan memang merupakan isu yang terbilang baru dalam dunia hubungan internasional. Di satu dasawarsa terakhir ini, dunia hubungan internasional menunjukkan adanya berbagai kecenderungan baru yang secara substansial sangat berbeda dengan masa-masa sebelumnya. Isu lingkungan menjadi fokus utama di beberapa negara karena hal ini menyangkut kelangsungan hidup masyarakat dunia dan telah timbul kesadaran pentingnya meningkatkan kualitas lingkungan.

Permasalahan yang dihadapi negara berkembang termasuk India adalah kurangnya proteksi lingkungan yang baik dan masih sangat kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan bagi mereka khususnya yang berada di daerah pelosok. Oleh karena itu, salah satu fokus pemberian bantuan JICA kepada negara-negara berkembang adalah pada bidang lingkungan. Jepang menganggap sangat penting untuk bekerja sama dengan India sebagai negara berkembang dibawah protokol Kyoto yang merupakan negara dengan emisi gas rumah kaca terbesar selain China dan di antara negara-negara berkembang lainnya. Di India, tindakan proteksi lingkungan ditangani di bawah rencana lima tahun *(five-year plan)* yang terkait dengan *Millennium Development Goals* (MDGs) yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Setelah KTT Stockholm pada tahun 1972, India memberlakukan beberapa undang-undang yang mengatur hal-hal umum yang berkaitan dengan lingkungan. Selain itu, peraturan perorangan diberlakukan untuk kualitas air, kualitas udara,

industri pertambangan, pembuangan limbah, laut, satwa liar, kehutanan, dan lain-lain. Di bawah pengawasan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sistem pengelolaan lingkungan yang mendasari di India terdiri dari Badan Pengendalian Polusi Sentral, badan perlindungan lingkungan dari negara bagian dan kota, dan dewan pengendalian pencemaran, yang benar-benar melaksanakan kegiatan manajemen.

Masalah lingkungan yang timbul di India hingga akhir 2011 ialah masalah lingkungan yang dihadapi karena pertumbuhan penduduk, peningkatan kegiatan industri dan pertanian, dan menipisnya sumber daya alam yang untuk 25 tahun mendatang. Aspek - aspek masalah yang dipilih yang memerlukan perhatian khusus diperlakukan dengan penekanan khusus pada situasi pedesaan. Status saat ini dari berbagai aspek pemukiman manusia seperti kualitas udara, air, sanitasi, kesehatan, dan perumahan - serta aspek konservasi hutan, tanah, dan kehidupan liar, diuraikan sejauh mungkin dengan cara kuantitatif. . Hal ini divisualisasikan bahwa pengelolaan lingkungan harus lebih serius dan semakin besar dimensinya di tahun - tahun mendatang. (https://goo.gl/twnqKy, diakses 27 Mei 2018).

Muncul dari penelitian bahwa dua masalah paling serius yang mungkin dihadapi India dalam 25 tahun adalah pencemaran air dan penggundulan hutan. serta populasi di India yang diproyeksikan mencapai sekitar 950 juta, 65% di antaranya akan tinggal di daerah pedesaan. Kapasitas lingkungan untuk menyerap limbah dan polusi yang menyertainya akan berkurang secara signifikan melalui pertumbuhan kegiatan manusia yang konsekuen. Saat ini, di daerah pedesaan, persentase penduduk dengan pasokan air bersih dan fasilitas sanitasi eksklusif

kurang dari 10%. Tanpa fasilitas saluran air limbah dan sanitasi yang tepat, limbah yang terakumulasi dapat bercampur dengan sumber daya air terbuka, sehingga menyebabkan tingkat pencemaran air yang tinggi. Efek pencampuran limpasan pertanian yang mengandung limbah, pestisida, dan pupuk, di sumber air pedesaan, juga perlu dipertimbangkan.

Praktek saat ini di daerah pedesaan untuk memperoleh lebih dari 90% bahan bakar domestik dari sumber non-komersial - kayu bakar, kotoran hewan, dan limbah pertanian - bahkan jika sangat berkurang, dapat terus berlanjut dan menyebabkan deforestasi dan karenanya erosi tanah, banjir, perubahan iklim, dan hilangnya varietas flora dan fauna yang berharga. Pembakaran seperti itu menyebabkan polusi udara juga. Terlepas dari masalah pencemaran air dan penggundulan hutan, masalah daerah perkotaan termasuk peningkatan permukiman kumuh, fasilitas transportasi yang tidak memadai, dan polusi industri - yang semuanya harus ditangani. Akhirnya, status undang-undang lingkungan saat ini ditinjau, dan kebijakan tertentu serta upaya intens untuk membangkitkan kesadaran lingkungan direkomendasikan (https://goo.gl/twnqKy, diakses 27 Mei 2018).

Tekanan terhadap lingkungan di India meningkat sebagai akibat dari pertumbuhan populasi dan ekonomi. Hal ini menyebabkan berbagai masalah pembangunan di daerah perkotaan seperti pengelolaan limbah padat yang buruk, pencemaran udara, kerusakan lingkungan hidup, pencemaran sungai dan lingkungan danau, dan lain - lain. Di daerah perkotaan, pencemaran lingkungan

yang disebabkan oleh limbah padat, polusi udara, adalah masalah yang mendesak. Rencana Lima Tahun mengidentifikasi target kebijakan berikut:

1. Minimalisasi volume limbah padat melalui proses insinerasi, pemisahan dan pengumpulan limbah dari rumah tangga, pengenalan daur ulang limbah padat dan peningkatan sistem pembuangan limbah padat;
2. Menurunkan tingkat polusi udara di semua metro utama untuk memenuhi standar kualitas udara yang ditetapkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Di daerah perkotaan India, untuk memperoleh air minum yang bersih dan pengolahan limbah merupakan masalah yang mendesak. dan telah menjadi tantangan utama ke masa depan. Di sektor penyediaan air, 75 juta penduduk di India tidak memiliki akses untuk mendapatkan air bersih baik di daerah maupun perkotaan, dan laju urbanisasi yang cepat mengarah pada kesenjangan yang meluas antara permintaan dan pasokan, menyebabkan kualitas, kuantitas, dan durasi layanan pasokan air yang tidak mencukupi. Di sektor sewerage (sistem perpipaan atau pengaliran air limbah), karena tingkat koneksi individu ke sistem sewerage masih kurang dari 30%, dan karena kapasitas pengolahan untuk pembuangan kotoran tidak mencukupi, limbah yang tidak diolah dibuang dan lingkungan hidup serta kebersihan penduduk setempat terancam. (http://www.indiaspend.com/cover-story/70-of-urban-indias-sewage-is-untreated-54844, diakses 20 Mei 2018)

Masalah lingkungan yang ditemukan di India yang berkaitan dengan peran Jepang melalui JICA ke India terkait masalah konservasi lingkungan, pada awal

abad ke - 20 jumlah rata-rata hutan yang lebat di India sekitar 40%. Namun, pada tahun 2005, persentase itu menurun menjadi 23,4%, yang jauh lebih rendah daripada rata-rata dunia (30,3%). Banyak tantangannya terhadap ekonomi terutama yang bergantung pada sumber daya hutan untuk pakan ternak, bahan bakar, dan pendapatan penduduk India itu sendiri. Secara khusus, peningkatan pesat populasi dalam beberapa tahun terakhir telah memiliki dampak yang meningkat pada hutan yang semakin mempercepat terjadinya degradasi hutan. Selain penurunan sumber daya hutan, kapasitas penyimpanan kelembaban hutan telah melemah, yang menyebabkan kekurangan air pertanian dan air minum. Hal ini pada akhirnya membuat hidup sebagian penduduk India mengalami kemiskinan pada wilayah dan sector yang sangat bergantung pada hutan.

Hutan terbuka di India mencakup 42,4% dari total kawasan hutan yang tidak dapat menawarkan tingkat sumber daya hutan yang sama dengan hutan lebat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas hutan dan meningkatkan pertumbuhan hutan adalah isu - isu penting yang perlu ditangani di India. Untuk menanggapi situasi yang disebutkan di atas, Pemerintah India bertujuan untuk meningkatkan luas hutan sebesar 5% pada akhir periode Rencana Lima Tahun. Selain itu, ini menekankan pentingnya pengelolaan hutan yang lestari melalui pengelolaan hutan bersama, promosi kegiatan penghasil pendapatan alternatif bagi mereka yang bergantung pada hutan, serta regenerasi hutan yang terdegradasi. Rencana Lima Tahun juga menyatakan bahwa pengembangan sistem manajemen informasi dan pengembangan sumber daya manusia harus diperkuat untuk mencapai tujuan pengelolaan hutan lestari.

Pada akhir Januari 2014 peringkat India merupakan ke 124 dari 178 negara pada Indeks Kinerja Lingkungan (EPI) dalam hal akses ke air dan sanitasi. Menurut Badan Pengawasan Polusi Pusat India, negara ini memiliki kapasitas terpasang untuk menangani sekitar 30% limbah rumah tangga yang dihasilkannya, sisanya dilepaskan ke saluran terbuka atau langsung ke tanah. Dan hanya dua kota, Delhi dan Mumbai, yang menghasilkan sekitar 17% dari limbah negara itu, telah memiliki hampir 40% dari kapasitas terpasangnya. Sementara 90% rumah tangga di Delhi dianggap memiliki sanitasi yang memadai karena mereka memiliki toilet di dalam ruangan, sementara hampir semua air limbah yang tidak diolah mengalir ke Sungai Yamuna, yang merupakan sumber air minum untuk daerah hilir kota (https://www.theguardian.com/sustainable-business/treating-india-wastewater-inaction-technology-public-health, diakses 23 Mei 2018).

Investasi India dalam air dan sanitasi, termasuk sistem perawatan, masih cukup rendah tetapi telah mengalami peningkatan selama dekade terakhir. Hasilnya jauh dari ideal, tetapi tetap menggembirakan. Misalnya pada tahun 1980, cakupan sanitasi pedesaan diperkirakan 1% dan pada tahun 2012, telah berkembang menjadi 21%. Kementerian usaha mikro, kecil dan menengah dan Dewan Inovasi Nasional juga baru-baru ini mengumumkan peluncuran Inovasi Inovasi India, yang dirancang untuk berinvestasi di beberapa sektor yang terkait sosial seperti air dan sanitasi.

Tetapi rencana lima tahun pemerintah yang ke dua belas (2012 - 2017) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi 8-9% akan terjadi jika persyaratan yang terkait dengan air dari pertumbuhan populasi telah terpenuhi. Peluang yang

disajikan oleh bantuan dari luar negeri ini sangat besar untuk memberikan setiap insentif pada sektor swasta berinvestasi di India, untuk melakukan apa yang terbaik dalam upaya mengembangkan teknologi baru yang lebih baik, sistem desain yang bekerja untuk kebutuhan lokal, spesifik, menemukan efisiensi. (https://www.theguardian.com/sustainable-business/treating-india-wastewater-inaction-technology-public-health, diakses 23 Mei 2018).

Dan sebagai contoh, keberhasilan yang telah dilakukan India berkat hasil bantuan JICA pada musim gugur tahun 2012 telah meengadakan konstruksi global untuk memasang sistem pengolahan dan pengadaan air bersih di daerah Kolkata, dalam program *Kolkata Environmental Improvement Project*. Sistem air dan limbah yang ada di Kolkata dinilai tidak memenuhi kebutuhan pembangunan ekonomi dan pertumbuhan penduduk. Studi JICA yang dihasilkan menyiapkan sejumlah laporan tentang sistem air dan sanitasi Kolkata, termasuk rencana dan studi kelayakan untuk pengembangan masa depan air dan sistem pembuangan kotoran di Kolkata.

Tujuan dari proyek ini adalah untuk menyediakan pasokan air yang aman dan stabil serta layanan saluran air limbah yang memadai yang akan memenuhi permintaan air yang meningkat pesat. Fasilitas pasokan air dalam Skema Pasokan Air akan diperluas dan direhabilitasi dan fasilitas sewerage akan diperluas dan yang baru dibangun di Kolkata, Agra, Bengal Barat.
(http://en.nissuicon.co.jp/experience/india/goa2009.html, diakses 23 Mei 2018).

Mempertimbangkan situasi yang disebutkan di atas, Pemerintah India telah menetapkan target untuk menyediakan sistem penyediaan air dan sistem

pengolahan sanitasi / pembuangan kotoran yang mulai dijalankan pada akhir 2011, yang kemudian terangkum dalam Rencana Lima Tahunan India pada tahun 2012 - 2017. Oleh karena itu, Rencana tersebut menetapkan bahwa baik India maupun setiap negara yang bekerja sama bersama pemerintah India harus merumuskan rencana pembangunan perkotaan yang komprehensif dan mencapai tujuan dengan memanfaatkan dukungan yang diberikan melalui Misi Pembaruan Perkotaan Nasional Jawahalal Nehru.

Terkait upaya yang dilakukan Jepang melalui JICA ke India juga berfokus pada konservasi dan peningkatan lingkungan pedesaan dan perkotaan dimana beberapa fokus pembangunan yang dijalankan pada tahun 2012 – 2017 adalah:

1. *Improvement of the Rural Environment and Infrastructure* atau Peningkatan Lingkungan Pedesaan dan Infrastruktur

Dalam rangka meningkatkan produktivitas pertanian dan mencapai produksi yang stabil tanpa dipengaruhi oleh kondisi cuaca, program ini bertujuan untuk mendukung pembangunan infrastruktur untuk produksi pertanian seperti sistem irigasi dan penggunaan sumber daya air pertanian yang lebih efisien. Dengan tujuan untuk mengisi kesenjangan antara daerah perkotaan dan pedesaan, program ini juga bertujuan untuk mempromosikan pembangunan infrastruktur dasar untuk meningkatkan lingkungan hidup di daerah pedesaan di mana sejumlah besar penduduk miskin tinggal disitu.

2. *Pollution Prevention and Management* atau Pencegahan dan Manajemen Polusi

Program ini bertujuan untuk meningkatkan fasilitas pengelolaan limbah padat, sistem pengumpulan dan transportasi, daur ulang limbah padat, dan kampanye kesadaran untuk meningkatkan sistem pengolahan limbah padat perkotaan.

3. *Water Quality and Water Resources Management (Development of Water Supply and Sewage Systems, Conservation of Rivers and Lakes)* atau Kualitas Air dan Pengelolaan Sumber Daya Air (Pengembangan Sistem Pasokan Air dan Limbah, Konservasi Sungai dan Danau)

Program ini bertujuan untuk mengembangkan infrastruktur untuk penyediaan air dan pembuangan air kotor, memastikan keberlanjutan keuangan dari lembaga-lembaga pelaksana, melakukan kegiatan pengembangan kapasitas untuk lembaga-lembaga pelaksana, memperluas layanan kepada masyarakat miskin (permukiman kumuh) dan mempromosikan proses partisipasi dan peningkatan kesadaran. Dalam upaya ini, program mempromosikan partisipasi sektor swasta untuk meningkatkan efisiensi operasi dan pemeliharaan.

Terkait upaya yang dilakukan Jepang melalui JICA ke India juga berfokus pada konservasi hutan dimana prioritas program yang dijalankan adalah *Afforestation and Forest Preservation Program* atau program pembentukan pepohonan di area di mana sebelumnya bukan merupakan hutan (https://wikivisually.com/lang-id/wiki/Aforestasi, diakses 20 Mei 2018). Langkah - langkah Kerjasama antara Jepang dengan India ini tidak dimaksudkan hanya untuk menanggulangi satu masalah saja, namun secara bersamaan mengejar banyak tujuan seperti pencegahan polusi, dan pencegahan pemanasan global yang

berkaitan dengan keberlangsungan kerjasama ekonomi. Oleh karena itu, pertama-tama perlu dilakukan tindakan proteksi lingkungan berdasarkan lokasi seperti di sumber polusi, desa dan tanaman yang terkena polusi.

Sesuai dengan berbagai kebutuhan di berbagai negara bagian di India, program ini bertujuan untuk mendukung secara fleksibel peningkatan kualitas hutan dan peningkatan tutupan hutan, pencegahan degradasi tanah, mempertahankan fungsi konservasi tanah dan air dari hutan, dan konservasi keanekaragaman hayati, melalui regenerasi hutan terdegradasi. Untuk memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan, penghasil pendapatan bagi penduduk dan pengembangan kapasitas bagi para pemangku kepentingan harus ditingkatkan dengan mendukung inisiatif Pemerintah India terhadap JFM. Untuk pengembangan kapasitas lebih lanjut untuk anggota staf di departemen kehutanan, kapasitas pelatihan di tingkat pusat / negara akan diperkuat melalui program ini.

Di India, masalah lingkungan, isu-isu sosial seperti pengentasan kemiskinan dan pembangunan ekonomi, pada prinsipnya, diperlakukan sebagai masalah yang saling berkaitan. masalah lingkungan telah didiskusikan dalam konteks yang sama seperti untuk mengurangi kemiskinan dan menyelesaikan masalah pendidikan pada KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan di Johannesburg, Afrika Selatan dan dalam kerangka *Milenium Development Goals* (MDGs). Dengan mengikuti pandangan masyarakat internasional, pemerintah India telah memasukkan langkah-langkah individual untuk melindungi lingkungan dan langkah-langkah untuk mencegah pemanasan global dalam

kerangka kerja dalam upaya untuk menangani kemiskinan dan isu-isu sosial lainnya.

Komisi Perencanaan pemerintah India yang merupakan organisasi yang bertanggung jawab untuk merumuskan rencana pada tingkat nasional telah mengadakan konferensi dengan semua kementerian dan lembaga, asosiasi industri, Perusahaan Pembiayaan Pembangunan Infrastruktur (IDFC, lembaga keuangan untuk pembangunan infrastruktur) dan organisasi non - pemerintah (LSM) untuk memasukkan langkah-langkah untuk pencegahan pemanasan global contohnya dalam rencana lima tahun ke dua belas yang telah dilaksanakan dari 2012 hingga 2017.

Hubungan antara MDGs Perserikatan Bangsa-Bangsa dan rencana lima tahun isu-isu perubahan iklim di India sejalan dengan Tujuan Pembangunan Milenium pembangunan berkelanjutan, pemerintah India bertujuan untuk meningkatkan bagian dari lahan nasional yang didiami oleh kawasan hutan dari 25 persen pada tahun 2007 dan 33 persen pada tahun 2012. Sebagai implikasi dari langkah - langkah ini dalam perubahan iklim, rencana ini mengutip mitigasi emisi gas rumah kaca, pengurangan impor bahan bakar fosil, pelestarian ekosistem, dan lain-lain.

Dengan demikian, India memberikan prioritas yang sama untuk semua masalah seperti pembangunan industri, pengentasan kemiskinan dan proteksi lingkungan, dan berusaha untuk menerapkan langkah-langkah komprehensif yang mencakup semua masalah ini. Dalam menangani masalah lingkungan, baik

industri dan pemerintah daerah bekerja untuk meningkatkan kesadaran akan isu-isu di antara warga dan perusahaan.

Di Delhi, misalnya, pada tahun 2017 terdapat program yang sedang berlangsung untuk merelokasi usaha kecil dan menengah di bagian industri pelapisan logam ke daerah pinggiran kota untuk memperbaiki lingkungan di dalam kota, selagi mempromosikan langkah-langkah lingkungan di pusat-pusat industri tanpa ada *trade-off* antara kebijakan untuk pengembangan dan langkah-langkah yang menangani lingkungan dan perubahan iklim; langkah-langkah dapat dianggap sebagai yang terutama ditujukan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi dan perbaikan lingkungan. Dalam beberapa tahun terakhir, perbaikan telah dilakukan dalam hal pelaksanaan langkah - langkah tersebut.

Dengan semakin banyaknya pemasukan untuk perekonomian Jepang sebagai imbas dari keberhasilan kebijakan JICA membuat perekonomian Jepang terus membaik dan meningkat. Pada periode ini, Jepang menunjukkan bagaimana keefektifan kebijakan progran bantuan luar negeri JICA dapat menunjang perekonomian dan proses industrialisasi yang terjadi di Jepang sehingga kebijakan ini disebut dengan *income doubling policy*. Pada era ini juga, Amerika Serikat sebagai pihak yang mendukung secara penuh bentuk kebijakan bantuan luar negeri ini di negara - negara berkembang, khususnya di Asia bertujuan untuk membangun negara - negara yang tidak terpengaruh komunisme pada masa tersebut. Sebagai masa-masa perang dingin antara blok timur dan barat membuat Amerika Serikat harus dapat memainkan peran strategi di negara - negara dunia ketiga untuk membendung perkembangan komunisme sehingga peran Jepang

sangat memainkan posisi penting pada masa perang dingin tersebut. Dengan berkembangnya negara – negara dunia ketiga melalui mekanisme bantuan luar negeri membuat posisi Amerika Serikat melalui Jepang semakin kuat untuk membendung komunisme.

Dari penjelasan di atas kita dapat melihat beberapa fase dalam perkembangan JICA sebagai alat kebijakan luar negeri Jepang guna meraih kepetingan nasional Jepang di luar negeri. Hal tersebut juga diperlihatkan dengan besaran anggaran yang dikeluarkan pemerintah Jepang dalam beberapa dekade belakangan.

Jepang melalui JICA yang mendukung proses demokratisasi di negara – negara agar dapat mengubah orientasi negara mereka menjadi negara yang berorientasi pasar. Hal tersebut tidak terlepas dari pandangan dan pengalaman Jepang sendiri yang berubah menjadi negara industri maju setelah merubah orientasi politik dan ekonomi mereka pasca kekalahan mereka di perang dunia ke-2. Melalui program - program yang dijalankan oleh para profesional dan para sukarelawan, Jepang melalui ODA membuat program - program yang bersinggungan dalam usaha memperbaiki dan meningkatkan kapasitas pemerintahan yang dapat mendukung ekonomi yang berorientasi dengan pasar.

Protokol Bisnis dan Rencana Jangka Menengah JICA dengan jelas menyatakan bahwa JICA melaksanakan kerja sama kegiatan sesuai dengan pedoman. JICA mendorong pemerintah negara tuan rumah, termasuk pemerintah daerah, peminjam, dan pemrakarsa proyek, untuk menerapkan langkah-langkah yang tepat untuk pertimbangan lingkungan dan sosial ketika terlibat dalam

kegiatan kerja sama. Pada waktu bersamaan, JICA memberikan dukungan untuk dan pemeriksaan pertimbangan lingkungan dan sosial di India sesuai dengan pedoman. Ketika mendorong pertimbangan yang tepat dari aspek lingkungan dan sosial, itu adalah milik JICA dimana kebijakan untuk memberikan dukungan aktif untuk proyek - proyek yang mempromosikan pelestarian lingkungan dan proyek yang berkontribusi terhadap perlindungan lingkungan global, seperti upaya untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. JICA juga memiliki kebijakan untuk terlibat aktif dalam mendukung peningkatan pertimbangan lingkungan dan sosial di negara berkembang.

Untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji peran *Japan International Cooperation Agency* dalam upaya proteksi lingkungan di India tahun 2012 - 2017 peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai acuan dalam pembahasan. Beberapa penelitian terdahulu yang akan digunakan penulis adalah penelitian Isabelle Faradiba dari program studi Ilmu Hubungan Internasional Universitas Katolik Parahyangan pada tahun 2017 dengan judul "Kontribusi Pemerintah Jepang Melalui *Japan International Cooperation Agency* dalam Mengurangi Emisi Gas Rumah Kaca di Indonesia". Dalam penelitian ini Isabelle membahas mengenai peranan JICA Jepang di Indonesia dalam upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, Penelitian ini menjelaskan lebih lanjut upaya apa saja yang dilakukan oleh JICA untuk membantu Indonesia dalam mengurangi emisi gas rumah kaca, dengan menggunakan teori Kerjasama Internasional dan beberapa konsep lain seperti Bantuan Luar Negeri dan Bantuan Pembangunan. Isabelle menyimpulkan bahwa JICA telah memberikan kontribusi melalui pelaksanaan

proyek-proyek di Kalimantan, namun kontribusi tersebut dapat dibilang tidak berhasil karena jumlah kebakaran hutan yang terjadi dari tahun 2012 hingga 2015 kian meningkat. Kebakaran hutan sendiri merupakan penghasil emisi gas rumah kaca yang signifikan.

Kedua penelitian yang dilakukan oleh Dwi Ayu Rahmawati dari program studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta pada tahun 2017 dengan judul "Pengaruh *Official Development Assistance* (ODA) Jepang Terhadap Percepatan Pembangunan Infrastruktur Di Indonesia Tahun 2009-2014". Dalam penelitian ini Dwi Ayu membahas mengenai pembiayaan pembangunan infrastruktur di Indonesia yang merupakan salah satu negara yang memanfaatkan ODA untuk mendorong percepatan pembangunan infrastrukturnya pada tahun 2009 - 2014, dalam penelitian ini ditemukan fakta bahwa eksistensi ODA dapat menjadi katalis terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia khususnya pada sektor energi dan transportasi. Melihat pentingnya peran *Japan International Cooperation Agency* yang mempengaruhi bidang - bidang strategis manusia dalam pembangunan infrastuktur serta masalah kesejahteraan ekonomi dan lingkungan di negara berkembang maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul: **"PERAN *JAPAN INTERNATIONAL COOPERATION AGENCY* (JICA) DALAM UPAYA PROTEKSI LINGKUNGAN DI INDIA TAHUN 2012 - 2017"**.

Dalam melakukan penelitian dan mengangkat masalah ini, peneliti mendapat dukungan dari beberapa mata kuliah disiplin Ilmu Hubungan Internasional, antara lain:

1. Diplomasi dan Negosiasi, mata kuliah ini mengkaji motif bantuan luar negeri yang ditujukan oleh satu negara ke negara lain sebagai alat pengontrol yang efektif. Dalam hal ini, Jepang melakukan *first track diplomacy* dalam memberikan bantuan dalam upaya proteksi lingkungan di India.
2. Politik Luar Negeri, mata kuliah ini mengkaji konsep kebijakan luar negeri dan bantuan luar negeri. Dalam hal ini, Jepang memberikan bantuan luar negerinya ke India melalui *Japan International Cooperation Agency* dalam upaya proteksi lingkungan di India.
3. Dinamika Politik Internasional, mempelajari fenomena hubungan antar negara di dunia. Dalam hal ini mengenai peran *Japan International Cooperation Agency* yang terjalin antara Jepang dan India.
4. *Environmental Issues*, mata kuliah ini mempelajari aktivitas perluasan kajian HI yang memfokuskan kajian pada aktivitas - aktivitas yang berdampak pada terjadinya kerusakan lingkungan. Isu lingkungan telah membawa perspektif masyarakat dunia bahwa isu lingkungan menjadi fokus penting bagi dunia. Dalam hal ini peran *Japan International Cooperation Agency* dalam upaya proteksi lingkungan di India merupakan contoh salah satu peran aktor HI dalam agenda sekuritisasi lingkungan.

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Rumusan Masalah Mayor

"Sejauhmana peranan yang dilakukan *Japan International Cooperation Agency* dalam proyek proteksi lingkungan di India tahun 2012 - 2017?"

1.2.2 Rumusan Masalah Minor

1. Bagaimana implementasi bantuan *Japan International Cooperation Agency* dalam upaya proteksi lingkungan di India tahun 2012 - 2017?
2. Apa kendala *Japan International Cooperation Agency* dalam merealisasikan bantuan upaya proteksi lingkungan ke India tahun 2012 - 2017?
3. Bagaimana perkembangan proteksi lingkungan di India setelah bantuan *Japan International Cooperation Agency* diberikan ke India pada tahun 2012 - 2017?

1.2.3 Pembatasan Masalah

Peneliti menentukan peran Jepang melalui *Japan International Cooperation Agency* dalam upaya proteksi lingkungan di India pada periode 2012 - 2017, dikarenakan kerangka bantuan dana yang diberikan JICA ke India untuk program proteksi lingkungan tercatat dalam data sejak 2012 hingga 2017 dibawah proyek *five-year-plan* India yang berkaitan dengan program proteksi lingkungan yang telah dan masih berlangsung. 2012 karena awal dilaksanakannya setelah pinjaman dana diberikan oleh Jepang dibawah *Comprehensive Economic*

Partnership Agreement between India and Japan in 2011 dalam proyek pengembangan upaya proteksi lingkungan di India mulai dilakukan dan 2017 merupakan akhir proyek *five-year-plan* dan data program terbaru yang telah dirilis pelaksanaannya. Oleh karena itu, peneliti juga mengambil permasalahan mengenai upaya pembangunan di India khususnya lingkungan setelah diberikannya bantuan dari Jepang tersebut, melihat dari hubungan bilateral Jepang dan India yang semakin erat.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui mengenai upaya proteksi lingkungan di India setelah diberikannya bantuan luar negeri Jepang melalui JICA ke India pada tahun 2012 - 2017.

1.3.2 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi bantuan *Japan International Cooperation Agency* dalam upaya proteksi lingkungan di India tahun 2012 - 2017
2. Untuk mengetahui kendala *Japan International Cooperation Agency* dalam merealisasikan bantuan upaya proteksi lingkungan ke India tahun 2012 – 2017
3. Untuk mengetahui perkembangan proteksi lingkungan di India setelah bantuan *Japan International Cooperation Agency* diberikan ke India pada tahun 2012 – 2017.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Diharapkan dapat memberikan atau menambah pembendaharaan pustaka, serta dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan studi Ilmu Hubungan Internasional terutama mengenai peran *Japan International Cooperation Agency* (JICA) dalam pengembangan dan proteksi lingkungan di India pada tahun 2012 – 2017 bahwa bantuan luar negeri dari negara maju memiliki peran yang signifikan terhadap keberlangsungan pembangunan dalam hal proteksi lingkungan kepada negara berkembang.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Kegunaan penelitian secara praktis diharapkan dapat memiliki kegunaan sebagai berikut :

1. Bagi Penyusun dapat menambah wawasan, ilmu pengetahuan, pengalaman dan kemampuan meneliti di bidang Ilmu Hubungan Internasional.
2. Bagi lembaga akademik sebagai bahan referensi dalam hubungannya dengan studi Hubungan Internasional.
3. Bagi mahasiswa dan umum, dapat menjadi sumber referensi dalam penulisan makalah, jurnal ilmiah, dan skripsi.